



Peran Pemimpin dalam Menangani Konflik Keamanan Nasional: Perspektif Etika Politik Islam

The Role of Leaders in Handling National Security Conflicts: an Islamic Political Ethics Perspective

Evhy Sekarwangi Putri^{a*}, Muh. Yusril Faudzi^a, Kurniati^a

^aUniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* Correspondence: 10200122032@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research discusses the role of leaders in resolving state security conflicts based on the perspective of Islamic political ethics. Leaders play an important role in achieving peace and prosperity in a country, so that in resolving a state security conflict, leaders participate fairly in maintaining the security of the people and the state. The purpose of this study theoretically is to provide an academic contribution on how the role of leaders in resolving state security conflicts based on the concept of Islamic political ethics. Practically, this research reveals how the methods and contributions of leaders in resolving national security conflicts based on the concept of Islamic political ethics. The results of this study reveal that in Islamic political ethics, the role and methods of leaders in dealing with national security conflicts rely heavily on the principles of justice (Al-Adl), wisdom (Hikmah), protection and security (Maslahah), consultation (Shura), forgiveness and reconciliation (Afw and Sulh), and law enforcement (Qisas and Ta'zir). Research shows that leaders who apply these principles are able to create a just, safe, and harmonious environment, which in turn increases community trust and well-being. Leaders are required to act impartially, use discretion in decision-making, protect individual rights and community safety, involve the community in the decision-making process, and encourage forgiveness and reconciliation. Shariah-compliant law enforcement is also emphasized to maintain justice and prevent further crimes.

Keywords: Political ethics, Islamic leaders and national security

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peran pemimpin dalam menyelesaikan konflik keamanan nasional berdasarkan perspektif etika politik Islam. Pemimpin berperan penting terhadap tercapainya perdamaian dan kesejahteraan dalam sebuah negara, sehingga dalam menyelesaikan sebuah konflik keamanan negara, pemimpin ikut adil dalam menjaga keamanan rakyat dan negaranya. Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan kontribusi akademis bagaimana peran pemimpin dalam menyelesaikan konflik keamanan nasional berdasarkan konsep etika politik Islam. Secara praktis penelitian ini mengungkap bagaimana metode dan kontribusi pemimpin terhadap penyelesaian konflik keamanan nasional yang di dasarkan pada konsep etika politik Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam etika politik Islam, peran dan metode pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional sangat bergantung pada prinsip-prinsip keadilan (Al-Adl), kebijaksanaan (Hikmah), perlindungan dan keamanan (Maslahah), konsultasi (Shura), pengampunan dan rekonsiliasi (Afw dan Sulh), serta penegakan hukum (Qisas dan Ta'zir). Penelitian ini menunjukkan bahwa pemimpin yang menerapkan prinsip-prinsip ini mampu menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan harmonis, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin dituntut untuk bertindak adil tanpa memihak, menggunakan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, melindungi hak-hak individu dan keamanan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta mendorong pengampunan dan rekonsiliasi. Penegakan hukum yang sesuai dengan syariah juga ditekankan untuk menjaga keadilan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.

Kata kunci: Etika politik, pemimpin Islam dan keamanan nasional

I. Pendahuluan

Dalam konteks keamanan nasional, peran pemimpin sangatlah krusial dalam menangani konflik yang mengancam stabilitas negara. Dari perspektif etika politik Islam, pemimpin diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung fisik tetapi juga sebagai pengayom moral dan spiritual bagi rakyatnya. Etika politik Islam menekankan prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan kesetaraan dalam setiap tindakan yang diambil oleh pemimpin. Ketika menghadapi konflik keamanan, seorang pemimpin yang berlandaskan etika politik Islam harus mengutamakan dialog, mediasi, dan penyelesaian yang adil, serta menghindari tindakan yang merugikan

atau menindas pihak tertentu. Namun, secara realita sering kali penerapan nilai-nilai dalam praktek politik menuai hambatan dan tantangan. Oleh karena itu peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional menjadi penting untuk dibahas.

Salah satu contoh konflik dalam konteks etika politik Islam adalah konflik antara Hamas dan Fatah di Palestina. Konflik ini mencerminkan perbedaan pendekatan politik dan pemerintahan dalam masyarakat yang sama. Hamas, sebuah organisasi Islamis, dan Fatah, sebuah partai sekuler, telah lama bersaing untuk pengaruh politik di Palestina. Perbedaan ini sering kali mengakibatkan ketegangan dan bentrokan yang mempengaruhi keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks etika politik Islam, pemimpin diharapkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan tidak sewenang-wenang, mengutamakan kepentingan umum, dan berusaha menciptakan perdamaian serta stabilitas¹.

Kepemimpinan yang beretika dalam menangani isu keamanan nasional dan mempromosikan persatuan sangat penting karena pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Pemimpin yang adil dan bijaksana akan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menerapkan hukum dengan konsisten, dan memfasilitasi dialog antar kelompok yang berselisih. Dengan demikian, pemimpin dapat mengurangi ketegangan, mencegah konflik berkepanjangan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan dan kemajuan bersama. Dalam konteks Islam, ini sesuai dengan prinsip etika politik yang mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparan, dan melayani rakyat.

Pandangan para pakar mengenai peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional dari perspektif etika politik Islam beragam: *Pertama* banyak pakar setuju bahwa pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan umum². Pemimpin harus menghindari tindakan yang menindas atau tidak adil, dan sebaliknya, mencari solusi yang inklusif dan adil untuk semua pihak yang terlibat dalam konflik. *Kedua*, Beberapa ahli menekankan pentingnya pemimpin mengedepankan dialog dan mediasi sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan konflik, sesuai dengan prinsip syura (konsultasi) dalam Islam³. Ini tidak hanya membantu mencegah eskalasi kekerasan tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan legitimasi kepemimpinan di mata rakyat.

Ketiga, perspektif politik Islam, pemimpin juga harus memastikan bahwa upaya menjaga keamanan tidak merusak nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat⁴. Artinya, kebijakan keamanan harus seimbang antara tindakan preventif dan reaktif, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap moralitas dan integritas Masyarakat. *Keempat*, para pakar juga menyoroti bahwa dalam era modern, pemimpin Muslim harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Islam dengan prinsip-prinsip modern dalam pengelolaan keamanan nasional, termasuk penerapan teknologi dan kerja sama internasional, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip etika yang dipegang dalam Islam⁵. Hal ini harus dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip etika Islam, sehingga tidak terjadi kompromi pada nilai-nilai inti agama dalam menghadapi kemajuan zaman.

¹Sudarno Shobron, 'Strategi Dan Etika Berpolitik Dalam Kajian Islam (Kajian Terhadap Kitab Shahih Muslim)', *Ishraqi : Jurnal Penelitian Keislaman*, 10.1 (2012), h. 14-30.

²Farhan Rahmawan Halim, 'The Concept of Leadership in Islamic Perspective', *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15.1 (2013), h. 89; Siti Aisyah and Ori Fahriansyah Elyta, 'Analisis Kebijakan Presiden Bashar Al-Assad Dalam Menangani Masalah Keamanan Di Suriah Tahun 2019-2020', *Sovereign, Jurnal Hubungan Internasional*, 1 (2021), 542; TA Brata, 'Peran Kepemimpinan Dalam Mengendalikan Konflik', *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 7.4 (2011), h. 56-64.

³Bani Syarif Maula, 'The Concept of Ṣulḥ and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law', *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 2.1 (2023), h. 73-86; Madiha Nawaz, Nimra Irfan, Prof. Dr. Syed Salahuddin Ahmed, 'Syrian Civil War in the Context of Conflict Resolution (Mediation Efforts)', *Pakistan Journal of International Affairs*, 4.1 (2021), h. 565-588.

⁴Hailan Salamun, 'Leadership Values and Understandings from an Islamic Perspective', *IntechOpen*, 11.tourism (2016), h. 13; Yayuk Lestari, 'Moral Panic And Politics Of Moral- The Role Of Authorities And Middle-Class In The Growth Of Islamic Pupilism In West Sumatra', *Jurnal Ranah Komunikasi*, 7.2 (2023), h. 101.

⁵Yassirly Amrona Rosyada, 'The History of Islamic Values Internalization in Enhancing National Morality in Indonesia', *Islah: Journal of Islamic Literature and History*, 2.2 (2021), h. 145-161.

Tujuan penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberi kontribusi akademis bagaimana peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional dari perspektif etika politik Islam. Penelitian ini secara praktik bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran pemimpin dalam menyelesaikan konflik keamanan nasional dari perspektif etika politik Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip etika politik Islam diterapkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemimpin saat menghadapi situasi konflik. Penelitian ini juga berupaya untuk mengukur efektivitas pendekatan Islami dalam resolusi konflik dibandingkan dengan metode lain, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh para pemimpin nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah mengenai integrasi etika dalam politik dan keamanan, serta menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik berdasarkan prinsip-prinsip etika politik Islam.

Dalam penelitian sebelumnya Jurnal “Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam” oleh Muhammad Harfin Zuhdi. Penelitian ini mengelaborasi ayat-ayat al-Qur’an secara tematik, menekankan pentingnya ajaran Islam sebagai panduan bagi pemimpin. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kebenaran dalam kepemimpinan, dengan mengacu pada patokan syari’at agar pemimpin terhindar dari kepentingan pribadi dan ideologi yang merugikan masyarakat yang dipimpinnya⁶. Banyak penelitian yang mengkaji terkait konsep pemimpin yang ideal dalam perspektif Islam namun masih sedikit yang membahas lebih dalam terkait peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional, oleh karena itu peneliti terinspirasi untuk meneliti lebih dalam tentang peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus pada bagaimana peran pemimpin dalam menyelesaikan konflik keamanan nasional dalam perspektif etika politik dan bagaimana metode yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin dalam menjaga keamanan nasional negaranya. Tujuan penelitian ini adalah dapat memperkaya pengetahuan ilmiah mengenai integrasi etika dalam politik dan keamanan, serta menawarkan panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik berdasarkan prinsip-prinsip etika politik.

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan kualitatif yang datanya bersumber dari buku-buku, skripsi, jurnal dari google scholar dan artikel dalam bentuk tertulis dalam sebuah situs-situs di internet yang memuat pengetahuan terkait permasalahan dalam penelitian ini, penelitian ini berfokus terhadap kajian teks dan aspek Analisa. Dengan itu, peneliti berusaha membaca, mengumpulkan informasi dan menganalisis data, kemudian merangkai dan merumuskan kata-kata dengan kalimat yang deskriptif⁷. Sementara sumber pustaka dan footnote dikelola melalui aplikasi mendelay. Data yang terkumpul selanjutnya ditarik kesimpulan yang akurat dan terpercaya yang diharapkan mampu menjawab setiap persoalan masalah yang ada dalam penelitian ini.

III. Pembahasan

1. Pengertian Etika Politik Islam dan keamanan Nasional

Etika adalah sebuah sistem, tata aturan perilaku, prinsip moral yang berlaku dalam sebuah lingkungan masyarakat. Dalam bahasa Inggris etika (ethics) berarti pantas, beradab dan layak. Sedangkan dalam bahasa Yunani etika (ethos) berarti kebiasaan, penggunaan watak, kecenderungan dan sikap yang terencana dan teratur⁸. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa etika adalah ilmu yang mengkaji tentang adat kebiasaan

⁶Muhammad Harfin Zuhdi, ‘Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam’, *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2022), h. 17–28.

⁷Perdy Karuru, ‘Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian’, *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2.1 (2013), h. 1–9.

⁸Muh. Adnan and Muh. Ilham Usman, ‘Etika Politik Dalam Al-Qur’an’, *Pappasang*, 4.2 (2022), h. 43–58.

atau norma tata perilaku yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.

Dalam pandangan etika politik, manusia memiliki dasar dimensi politis yang bisa dikaji dari tiga hal yaitu manusia sebagai makhluk sosial, manusia dengan dimensi kesosialannya, serta dimensi politis kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan bentuk kesepadanan yang menggambarkan seorang manusia bebas melakukan tindakan berdasarkan keinginannya, tetapi sebuah tindakan manusia akan berarti ketika telah berada di tengah-tengah manusia yang lain⁹. Maksudnya adalah manusia mampu menampilkan potensi terbaik dalam dirinya serta mampu meningkatkan kualitas hidup dan berkembang pesat saat berada ditengah banyak orang.

Adapun dimensi sosial dapat dipahami sebagai bentuk alamiah pencarian jati diri atau ciri khas yang menjadi karakter seorang individu saat berinteraksi bersama orang lain. Sedangkan dimensi politis merupakan aktivitas yang mencerminkan kehidupan manusia dalam membentuk, mengatur dan menjalankan fungsi kerangka kehidupan manusia baik secara efektif maupun normatif. Dalam beberapa hal seseorang individu akan kehilangan tiga dimensinya sebagai manusia jika melakukan pelanggaran etika.

Salah satu contoh kasus pelanggaran etika adalah pelanggaran yang dilakukan mantan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Diketahui masa menjabat Zulhas selaku Ketua MPR RI semestinya sudah berakhir sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan MPR masa bakti 2019-2024 yang digelar pada 1 Oktober 2019 lalu. Dengan demikian, sejak 1 Oktober secara etik para pejabat sebelumnya sudah harus mulai menanggalkan fasilitas publik yang digunakan, termasuk ruang kantor dan lainnya. Sedangkan Zulhas masih menempati rumah dinas dan menikmati fasilitas yang bukan lagi menjadi haknya, hal ini dinilai sebagai perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh mantan pejabat politis serta tidak patut untuk ditiru¹⁰.

Meskipun tidak ada aturan yang melarang namun jika bercermin pada padangan etika yang dilakukan oleh Zulhas merupakan perbuatan yang melanggar etika politik yang bersinggungan dengan perkara moralitas publik yang merujuk pada standar normatif yang menjadi pedoman (acuan) perilaku elit politik. Zulhas secara personal bermasalah, sebab secara moral tidak dibenarkan dan saat waktu bersamaan juga melanggar secara etika politik.

Dalam Islam, etika politik mencakup nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, musyawarah, dan kebebasan. Dengan menganalisis pemikiran para pemikir muslim seperti al-Mawardi, dan Ibn Taymiyyah dapat membantu dalam memahami etika politik dalam Islam¹¹. Dengan beretika dalam politik, diharapkan kehidupan politik dapat lebih santun dan membawa kemaslahatan bagi rakyat. Etika politik dalam islam saat dikaji secara mendalam dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diimplementasikan secara menyeluruh dapat memberikan dampak yang signifikan. Keberadaan etika politik akan melahirkan pemimpin yang bertakwa kepada Allah, menjauh dari perilaku menyimpang, dan menciptakan kehidupan politik yang bebas, jujur, dan teratur.

Al-Mawardi memandang bahwa seorang pemimpin harus bertindak berdasarkan keadilan dan mengutamakan kemaslahatan umat, etika politik menuntut pemimpin untuk memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan dan memperhatikan nilai-nilai Islam¹². Maksud dari pandangan Al-Mawardi adalah seorang pemimpin harus bertindak adil dan memprioritaskan kebaikan semua rakyatnya, pemimpin harus memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan, dan menjadikan syariat islam sebagai landasan tindakan politik. Berdasarkan hal ini pemimpin diharapkan mampu amanah, bertanggung jawab dan mengutamakan kesejahteraan bersama.

Etika politik dalam pandangan Ibnu Taimiyah menekankan pada integritas pemimpin, penerapan prinsip

⁹Farah Sabilla Febriany and Dinie Anggraeni Dewi, 'Nilai-Nilai Pancasila Dan Dinamika Etika Politik Indonesia', *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2.04 (2021), h. 690-695.

¹⁰Zulkifli Hasan, 'Krisis Etika Politik', *PinterPolitik*, 2020, h. 1-5.

¹¹Dewi Dahlan, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)', *Menara Ilmu*, 15.1 (2021), h. 42-50.

¹²Rashda Diana, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono, 'Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi', *Tsaqafah*, 14.2 (2018), h. 363-384.

syariah, dan nilai-nilai seperti keadilan, persaudaraan, dan permusyawaratan¹³. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini memberikan pemahaman bahwa seorang pemimpin harus bertindak berdasarkan prinsip Islam dan pemimpin harus mengutamakan asas keadilan dalam setiap tindakan yang diputuskannya dan mengutamakan perlindungan, kesejahteraan dan stabilitas sosial terhadap rakyat yang dipimpinnya.

Keamanan berasal dari bahasa Latin *securus* yang bermakna terbebas dari bahaya dan terbebas dari ketakutan¹⁴. Keamanan nasional merupakan hal penting dalam sebuah bangsa dan negara. Keamanan berperan penting menjaga perdamaian dan kesejahteraan sebuah negara dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan, merusak dan menghancurkan negara baik secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan teori tradisional mengutip dari pendapat Hans bahwa keamanan nasional berarti perlindungan wilayah dari ancaman militer eksternal dan serangan dari negara-negara berdaulat¹⁵. Namun pasca perang dingin mengakibatkan terjadinya pergeseran pengertian terhadap keamanan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isu-isu dalam hak asasi manusia, globalisasi, perkembangan teknologi dan terorisme yang muncul pasca perang dingin berakhir sehingga berdampak terhadap konsep keamanan nasional yang artinya semakin meluas yang mengharuskan definisi keamanan nasional berubah dan menyesuaikan untuk tetap relevan dan update terhadap situasi dan kondisi saat ini.

Setelah pasca perang dingin, human security menilai bahwa keamanan nasional adalah keamanan manusia yang didalamnya mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, kelompok minoritas, anak-anak, wanita dari kekerasan fisik dan masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik¹⁶. Pemahaman ini lebih mengacu pada perlindungan kehidupan manusia dari berbagai jenis kekuatan yang mengancam eksistensi dan perkembangan kehidupan manusia tersebut.

Wolfers mendefinisikan bahwa keamanan memiliki kepentingan bukan hanya perlindungan dari nilai-nilai yang sebelumnya dicapai, tetapi juga harapan masa depan dan hasil yang bernilai yang akan dinikmati kemudian hari¹⁷. Maksudnya adalah keamanan tidak hanya melibatkan perlindungan terhadap nilai-nilai yang telah dicapai, tetapi juga melibatkan harapan dan hasil bernilai di masa depan. Keamanan dalam pandangan Wolfers berbicara tentang mempertahankan apa yang sudah ada, tetapi tetap juga memastikan potensi keberhasilan dan kebahagiaan di masa mendatang.

2. Peran Pemimpin dalam Menyelesaikan Konflik Keamanan Nasional

Edwin A. Locke mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang berproses membujuk orang lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi¹⁸. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa pemimpin adalah individu yang menggunakan pengaruh, kekuasaan dan kemampuannya untuk membujuk orang lain dalam mengambil tindakan untuk tujuan bersama. Sedangkan kepemimpinan artinya melibatkan pemimpin dalam memberikan contoh dan mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Dalam memimpin sebuah negara pemimpin memiliki tanggung jawab besar, seorang pemimpin dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan dalam masyarakat, mengingat peran pemimpin dalam sebuah pemerintahan yang sangat penting, sehingga membutuhkan kewibawaan dan kecakapan terhadap langkah-

¹³Muhammad Azhar Latif, 'Pengertian Etika Politik Serta Pendapat Ibnu Taimiyah', *Tashdiq*, 4.2 (2024), h. 53–54.

¹⁴RR Zahroh Hayati Azizah, 'Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan Dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa', *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6.3 (2021), h. 94–104.

¹⁵Uni W. Sagena and M. Hasyim Mustamin, 'Memahami Konsep Keamanan Energi: Antara Pendekatan Tradisional Dan Non-Tradisional', *Understanding Energy Security Concept*, 2019, h. 1–16; Umar Suryadi Bakry, 'Studi Keamanan Internasional Pasca Perang Dingin', *Science*, 1.1 (2022), h. 1–16.

¹⁶Al A'raf, 'Dinamika Keamanan Nasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.1 (2015), h. 27–40.

¹⁷Indah Amaritasari, 'Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.2 (2015), h. 153–174.

¹⁸Encep Syarifudin, 'Teori Kepemimpinan', *Al Qalam*, 102, 2004, h. 1–19.

langkah dalam setiap keputusan yang diambilnya. Kepemimpinan merupakan perwakilan aspirasi terhadap kelompok masyarakat, artinya adalah pemimpin memiliki fungsi eksekutif dan fungsi administrasi meliputi bentuk kerjasama dan intruksi dalam berbagai aktifitas sehingga dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus menjadi panutan, teladan dan perantara dari kelompok yang dipimpinnya. Berdasarkan hal ini, Allah swt berfirman dalam QS. Ali-Imran: 104

*“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang munkar mereka merupakan orang-orang beruntung.”*¹⁹

Ayat ini memberi isyarat bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mampu menyeru melaksanakan kebaikan bagi seluruh pengikutnya dan meninggalkan hal-hal yang tercela dan munkar dalam berbagai situasi dan kondisi lingkungan²⁰. Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mengarahkan suatu masyarakat atau negara menuju tujuan yang diinginkan. Dalam Islam, konsep pemimpin yang baik memiliki dasar-dasar yang kuat berdasarkan ajaran agama dan prinsip keadilan. Berlandaskan hal ini Adapun kriteria pemimpin yang baik dan ideal adalah (1) pemimpin yang beragama muslim, (2) Pemimpin yang memiliki sifat yang amanah dan adil, (3) Pemimpin yang bertanggung jawab dan kuat dalam menegakkan tugas pemerintahan²¹.

Konsep pemimpin yang baik dan ideal, yang didasarkan pada ajaran agama dan prinsip keadilan, memiliki relevansi penting dalam menyelesaikan konflik keamanan negara dari perspektif etika politik Islam²². Pemimpin yang beragama Muslim, memiliki sifat amanah dan adil, serta bertanggung jawab dan kuat dalam menegakkan tugas pemerintahan, mampu menerapkan nilai-nilai Islam yang mendalam dalam setiap aspek kepemimpinannya.

Sejarah mencatat contoh nyata dari kepemimpinan semacam ini, seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (Saladin) yang dikenal karena keadilannya selama Perang Salib pada abad ke-12. Ketika merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, Salahuddin memperlakukan tawanan perang dengan kebaikan dan menjamin keselamatan penduduk Yerusalem, menunjukkan sifat amanah dan adil dalam kepemimpinannya. Selain itu, Khalifah Umar ibn Khattab juga dikenal dengan keadilannya yang tegas dan keberaniannya. Selama masa kepemimpinannya, Umar berhasil menyatukan berbagai suku Arab dan memperluas wilayah kekhalifahan dengan cara-cara yang adil dan bertanggung jawab, serta menerapkan sistem administrasi yang transparan, yang memastikan kesejahteraan dan keamanan bagi semua warga negara, termasuk non-Muslim²³.

Adapun kasus pada era modern yaitu tentang kepemimpinan Nelson Mandela, meskipun bukan seorang Muslim, memperlihatkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep kepemimpinan ideal dalam Islam. Mandela fokus pada rekonsiliasi nasional dan keadilan setelah bertahun-tahun apartheid di Afrika Selatan,

¹⁹Al-Qur'an Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 5.1 (2019), h. 91.

²⁰Nur Fazillah, 'Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *Intelektual Journal Of Education Sciences and Teacher Training*, 12.1 (2023), h. 112-132.

²¹Amir Hamzah, 'Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)', *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 10.2 (2018), h. 13-28; Muhammad Zaini dkk, 'Kriteria Pemimpin Dalam Al-Qur'an Dan Aplikasinya Pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar', *Tafse: Journal of Qur'anic Studies*, 6.1 (2021), h. 47; Syamsul Dwi Maarif, 'Kriteria Pemimpin Yang Ideal Dalam Islam Beserta Dalil Naqlinya', *Tirto*, 2022, h. 1-4; Sarkawi and Fadli Ahmad, 'Memilih Pemimpin Dalam Islam', *Idarotuna*, 3.3 (2022), h. 198; Zulkarnaini, 'Memilih Pemimpin Menurut Al Quran Dan Sunnah', *Manajemen Dakwah*, 2018, h. 67-70; Abdul Hamid, 'Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan Dan Negara Menurut Al-Mawardi', *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Abstrak*, 2015, h. 86-98.

²²Muhammad Charis and others, 'Kategori Kepemimpinan Dalam Islam', *Edukasi Nonformal*, 1.2 (2010), h. 171-189; Muhamad Arifin, 'Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran', *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023), h. 151-160; Muhammad Harfin Zuhdi, 'Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2022), h. 17-28.

²³Nor Mohd Roslan Mohd and Noor Nor Shakila Mohd, 'Perang Salib Dan Kejayaan Salahuddin Al-Ayubi Mengembalikan Islamicjerusalem Kepada Umat Islam (Crusades and Saladin's Achievement in Liberating Islamicjerusalem to Muslims Ummah)', *Jurnal Al-Tamaddun*, 7.1 (2012), h. 61-74; Marwa, 'Umar Bin Khattab: Potret Keteladanan Sang Pemimpin Umat', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), h. 1-5.

dengan sifat amanah dan adil, mempromosikan kesetaraan dan persatuan²⁴. Meskipun kepemimpinannya menghadapi kritik, upayanya dalam menjaga keamanan nasional dan menegakkan pemerintahan yang kuat menunjukkan relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam konteks modern.

Di era kontemporer, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang mengidentifikasi dirinya sebagai pemimpin Muslim, berusaha menerapkan kebijakan yang mengedepankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat dalam menangani isu-isu keamanan nasional²⁵. Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana konsep kepemimpinan yang berlandaskan ajaran agama dan prinsip keadilan dapat diterapkan dalam berbagai konteks historis dan kontemporer untuk menyelesaikan konflik keamanan dan membangun masyarakat yang stabil dan sejahtera.

Ketika menghadapi konflik keamanan, pemimpin seperti ini akan mengedepankan keadilan dan kebenaran, berusaha mencapai resolusi yang tidak hanya efektif tetapi juga etis, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan integritas dan kejujuran, mereka dapat membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat, sementara tanggung jawab dan kekuatan mereka memungkinkan untuk mengatasi tantangan dan menjaga stabilitas. Dalam perspektif etika politik Islam, pemimpin yang ideal ini berperan sebagai penjamin perdamaian dan keadilan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam etika politik Islam, peran dan metode pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap kepentingan umat. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari peran dan metode pemimpin dalam hal ini:

a. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Pemimpin harus bertindak adil dalam menangani konflik, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan setara. Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam hukum Islam (syariah) dan sangat ditekankan dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam berbagai ayat²⁶. Salah satunya adalah QS. Al-Maidah ayat 8:

"Wahai orang-orang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan"²⁷.

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan ketakwaan, mengingatkan para pemimpin untuk berlaku adil tanpa memandang perasaan pribadi atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Dalam praktik kepemimpinan, prinsip ini diterapkan dengan membuat keputusan yang objektif dan tidak memihak, serta memastikan semua tindakan dan kebijakan diambil berdasarkan kebenaran dan keadilan. Keadilan juga ditekankan dalam QS. An-Nisa ayat 135:

"Hai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran"²⁸.

Dalam konteks kepemimpinan, ayat ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas tinggi, mampu membuat keputusan yang adil tanpa terpengaruh oleh hubungan pribadi atau status sosial. Penerapannya dalam kepemimpinan berarti seorang pemimpin harus bersikap transparan, jujur, dan berani menegakkan kebenaran meskipun menghadapi tekanan atau risiko. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin

²⁴Futri Rahayu Gusmiarni, 'Peranan Nelson Mandela Dalam Memperjuangkan Demokrasi Di Afrika Selatan Tahun 1990-1994', *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 11.1 (2022), h. 59-68.

²⁵Rafiqi Ihsan and Iskandar Ritonga, 'The Relevance of Prophet Muhammad's Leadership As a Modern Leadership Role Model', *Jurnal El-Riyasah*, 13.2 (2022), h. 1.

²⁶Rifky Adji Sukmana, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan, 'Paradigma Keadilan Dalam Penegakan Hukum Negara Berdasarkan Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 8.2 (2023), h. 17-32.

²⁷Al-Qur'an Kemenag, h. 153.

²⁸Al-Qur'an Kemenag, h. 144-145.

yang mempraktikkan keadilan dan integritas yang tinggi dalam pengambilan keputusan mampu membangun budaya organisasi yang positif, meningkatkan moral dan kepercayaan di antara anggota organisasi, serta mendorong lingkungan kerja yang etis dan produktif.

Dalam praktiknya, Islam mendorong keadilan di berbagai aspek kehidupan baik dalam konteks keadilan sosial, ekonomi, dan hukum²⁹ yaitu: (1) Islam mengajarkan kesetaraan di hadapan Allah berdasarkan takwa. Dalam masyarakat Muslim, keadilan sosial tercermin dalam perawatan yang adil terhadap yatim piatu, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan, (2) Islam memperhatikan distribusi kekayaan secara adil. Zakat (sumbangan wajib) dan infaq (sumbangan sukarela) digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan, (3) Sistem hukum Islam (syariah) berfokus pada keadilan dan perlindungan hak individu. Hakim diwajibkan untuk memutuskan perkara dengan adil, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pihak yang terlibat.

b. Kebijakan (Hikmah)

Pemimpin harus menggunakan kebijakan dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak jangka panjang dari tindakan yang diambil. Ini termasuk menggunakan pendekatan diplomatik dan negosiasi sebelum memilih opsi militer. Kebijakan (hikmah) adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pemikiran yang mendalam. Dalam konteks kepemimpinan, kebijakan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan kompleks dan memastikan keputusan yang tepat. Al-Quran menekankan pentingnya kebijakan dalam berbagai ayat. Salah satunya adalah QS. Al-Baqarah ayat 269:

"Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah, pasti dia diberi kebaikan yang banyak"³⁰.

Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan adalah karunia dari Allah dan merupakan sifat yang diinginkan dalam kepemimpinan³¹. Kebijakan ini mencakup pemahaman mendalam tentang agama, kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Anugerah ini digambarkan sebagai karunia yang besar karena memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik tentang hidup dan ajaran-ajaran Allah. Ayat ini juga menekankan bahwa hanya orang-orang yang memiliki akal sehat dan pemikiran mendalam yang mampu memahami dan menghargai nilai kebijakan. Selain itu, ayat tentang kebijakan juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30:

"Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'³²."

Ayat ini membahas pernyataan Allah tentang penciptaan manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. Dalam konteks kepemimpinan, ayat ini menekankan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi dengan bijaksana dan adil. Meskipun para malaikat mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang potensi kerusakan dan pertumpahan darah yang mungkin dilakukan manusia, Allah menegaskan bahwa Dia memiliki pengetahuan dan hikmah yang lebih besar mengenai potensi dan tujuan penciptaan manusia³³. Kepemimpinan manusia, dalam pandangan Islam, bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang amanah untuk menjalankan tugas dengan keadilan, tanggung jawab, dan pemahaman mendalam akan tujuan mulia yang diemban oleh manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Khalifah di sini mengandung makna

²⁹Fauzi Almubarak, 'Keadilan Dalam Perspektif Islam', *Istighna*, 1.2 (2018), h. 115-143; Hilmiatus Sahla and M Yasir Nasution, 'Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.03 (2023), h. 1-7.

³⁰Al-Qur'an Kemenag, h. 67.

³¹Fardiana Fikria Qur'any, 'Konsep Hikmah (Kebijakan) Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Falsafah Islam', *Ikmal*, 1.1 (2020), h. 1-3.

³²Al-Qur'an Kemenag, h. 13.

³³Arqom Kuswanjono, 'Hakikat Ilmu Dalam Pemikiran Islam', *Jurnal Filsafat*, 26.2 (2016), h. 291-321.

pemimpin yang bertanggung jawab dan bijaksana.

Implementasi Kebijakan dalam Kepemimpinan³⁴ yaitu: (1) Seorang pemimpin bijaksana mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan. Ini melibatkan evaluasi yang hati-hati, refleksi, dan pertimbangan konsekuensi jangka Panjang, (2) Kebijakan melibatkan pendekatan diplomatik dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan kompromi, (3) Dalam praktiknya, pemimpin bijaksana akan memilih opsi yang paling realistis dan efektif, menghindari tindakan impulsif, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Kebijakan menjadi landasan penting bagi pemimpin untuk menjalankan perannya dengan efektif dan berkelanjutan. Pemimpin yang bijaksana tidak hanya bertindak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga dengan refleksi mendalam dan pertimbangan matang. Mereka mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan situasi melalui pendekatan diplomatik, serta mengutamakan dialog dan kompromi untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, keputusan yang diambil oleh pemimpin bijaksana selalu memperhatikan dampak jangka panjang, memastikan bahwa tindakan yang diambil realistis dan efektif tanpa bersifat impulsif. Dengan demikian, kebijakan memungkinkan pemimpin untuk mencapai tujuan dengan cara yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan Bersama.

c. Perlindungan dan Keamanan (Maslahah)

Dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan umat. Konsep masalah (kemaslahatan) adalah prinsip yang menekankan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik yang dapat membahayakan masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, kebebasan beragama, dan keamanan fisik. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 251, Allah swt. Berfirman:

"Dan jika Allah tidak memerintahkan manusia untuk saling membantu dan berbuat baik, tentulah bumi ini telah dipenuhi oleh orang-orang yang zalim³⁵. "

Surah Al-Baqarah ayat 251 memberikan pelajaran penting mengenai peran pemimpin dalam perlindungan dan keamanan. Ayat ini menceritakan bagaimana tentara Thalut, dengan izin Allah, mengalahkan tentara Jalut, dan bagaimana Nabi Dawud membunuh Jalut serta diberikan kerajaan dan hikmah oleh Allah. Dalam konteks kepemimpinan, ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki iman yang kuat dan keberanian untuk menghadapi ancaman dan tantangan demi melindungi dan menjaga keamanan rakyatnya. Pemimpin yang diberkahi dengan kebijakan, seperti Nabi Dawud, mampu mengambil keputusan yang tepat dan adil, yang merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat³⁶. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menetapkan mekanisme sosial di mana persaingan dan perjuangan antar manusia berfungsi untuk mencegah kerusakan di bumi.

Dalam konteks peran pemimpin, ini berarti bahwa pemimpin harus mampu mengelola konflik dan persaingan secara efektif untuk memastikan bahwa masyarakat tetap aman dan seimbang³⁷. Pemimpin harus menciptakan sistem hukum dan keadilan yang mencegah ketidakadilan dan penindasan, serta mempromosikan kesejahteraan umum. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif dalam perlindungan dan keamanan tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan strategi militer, tetapi juga integritas moral, kebijakan, dan kemampuan untuk mengelola dinamika sosial secara adil.

Secara praktis, pemimpin harus memastikan keberlanjutan keamanan melalui kebijakan yang efektif, penegakan hukum yang adil, dan kerjasama dengan lembaga keamanan. Contoh nyata termasuk pencegahan terorisme, penanganan bencana alam, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemimpin juga harus memastikan

³⁴Daswati, 'Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi', *Academica Fisip Untad*, 04.01 (2012), h. 783-798.

³⁵Al-Qur'an Kemenag, h. 62.

³⁶Muhammad Olifiansyah Dkk, 'Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *At-Tajdid*, 4.4 (2020), h. 102-112.

³⁷Hafniati, 'Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah', *Radenintan*, 13.1 (2018), h. 117-140; Muhammad Olifiansyah Dkk, 'Konsep Konsep Kepemimpinan Islam Dalam Masyarakat', *Edupsyscouns*, 1.1 (2020), h. 1-11.

akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang aman. Bukti ilmiah dapat ditemukan dalam penurunan angka kejahatan, peningkatan kesejahteraan social.

d. Konsultasi (Shura)

Pemimpin dianjurkan untuk melibatkan ahli dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme konsultasi. Shura, atau konsultasi, merupakan prinsip fundamental dalam kepemimpinan Islam yang menekankan pentingnya melibatkan para ahli dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang komprehensif dan memastikan keputusan yang diambil mewakili kepentingan kolektif³⁸. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat tentang pentingnya musyawarah. Salah satunya adalah QS. Al-Imran ayat 159 yang menyatakan:

"Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah³⁹."

Ayat ini menegaskan bahwa musyawarah merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah. Selain itu, ayat ini merupakan perintah untuk bermusyawarah dalam urusan-urusan penting. Dalam praktiknya, ini berarti seorang pemimpin harus melibatkan orang-orang yang dipimpinnya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melakukan musyawarah, pemimpin bisa mendapatkan berbagai perspektif yang berbeda, yang membantu dalam membuat keputusan yang lebih komprehensif dan adil. Setelah musyawarah dan mencapai keputusan, pemimpin harus bertawakal kepada Allah, menunjukkan kepercayaan penuh bahwa keputusan tersebut, setelah melalui proses konsultasi yang bijaksana, akan membawa kebaikan⁴⁰.

Ayat ini secara keseluruhan menekankan bahwa dengan sifat lemah lembut, pemaaf, dan terbuka untuk bermusyawarah, seorang pemimpin akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, serta bimbingan dan berkah dari Allah. Selain itu, musyawarah juga dijelaskan dalam QS. Ash-Shura ayat 38, Allah berfirman:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka⁴¹."

Surah Ash-Shura ayat 38 menggambarkan karakteristik orang-orang beriman yang ideal menurut Islam. Ayat ini menyoroti tiga aspek penting: (1) kepatuhan kepada seruan Allah, pelaksanaan shalat, dan musyawarah dalam urusan mereka. (2) Kepatuhan kepada seruan Allah menunjukkan ketaatan mutlak dan kesediaan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya. (3) Pelaksanaan shalat mencerminkan hubungan spiritual yang kuat dengan Allah, yang menjadi fondasi moral dan etika dalam kehidupan mereka⁴².

Aspek paling relevan dalam konteks kepemimpinan adalah prinsip musyawarah. Ayat ini menegaskan bahwa keputusan-keputusan penting harus diambil melalui konsultasi bersama, yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dan inklusivitas dalam Islam. Musyawarah memastikan bahwa berbagai pandangan dipertimbangkan, sehingga keputusan yang diambil lebih bijaksana, adil, dan representatif.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip musyawarah (shura) dalam kepemimpinan dapat terlihat dalam berbagai bentuk. Misalnya, di negara-negara dengan mayoritas Muslim, prinsip ini diadopsi dalam bentuk dewan syura atau majelis konsultatif, di mana perwakilan dari berbagai sektor masyarakat berkumpul untuk memberikan masukan dan membuat keputusan bersama mengenai kebijakan publik. Contoh lain adalah dalam organisasi

³⁸Fahrur Muzaqqi, 'Musyawarah Mufakat: Gagasan Dan Tradisi Genial Demokrasi Deliberatif Di Indonesia', *Jurnal Politik Indonesia*, 1.2 (2015), h. 73-82.

³⁹Al-Qur'an Kemenag, h. 102.

⁴⁰Najda Arija Azukma and Mardian Idris Harahap, 'Musyawarah Dalam Al-Quran Perspektif Mufassir Nusantara (Quraish Shihab Dan Hasbi Ash-Shiddieqy)', *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8.3 (2023), h. 320-326.

⁴¹Al-Qur'an Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 11-20', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, h. 250.

⁴²Ja'far Muttaqin and Aang Apriadi, 'Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1.2 (2020), h. 57-73.

dan komunitas, di mana para pemimpin sering mengadakan pertemuan rutin dengan anggota untuk mendiskusikan isu-isu penting dan mencari solusi bersama.

Penerapan musyawarah dalam kepemimpinan modern juga dapat dilakukan melalui mekanisme seperti survei, forum diskusi, atau panel konsultatif, yang melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Ini membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan⁴³. Dengan demikian, kepemimpinan yang menerapkan prinsip musyawarah tidak hanya memenuhi tuntutan moral dan etika agama, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Kepemimpinan semacam ini menciptakan lingkungan yang lebih demokratis dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, shura membantu menciptakan kepemimpinan yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

e. Pengampunan dan Rekonsiliasi (Afw dan Sulh)

Islam mendorong pengampunan dan rekonsiliasi sebagai bagian dari resolusi konflik. Pemimpin harus berusaha untuk mengatasi konflik melalui jalan damai, memfasilitasi dialog antara pihak yang bertikai, dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. Pengampunan (afw) dan rekonsiliasi (sulh) merupakan konsep penting dalam Islam yang berkaitan dengan penyelesaian konflik secara damai⁴⁴. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mendorong umatnya untuk memaafkan dan mencari perdamaian. Adapun beberapa ayat yang membahas tentang afw dan sulh yaitu Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 237:

"Dan jika kamu memaafkan, lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan⁴⁵."

Surah Al-Baqarah ayat 237 mengajarkan pentingnya pengampunan, menjaga hubungan baik, dan kesadaran akan pengawasan Allah Swt dalam konteks kepemimpinan. Ayat ini menekankan bahwa seorang pemimpin yang mampu memaafkan menunjukkan kedekatan kepada takwa, yang merupakan karakteristik penting bagi kepemimpinan yang bertakwa. Seorang pemimpin harus selalu mengingat dan menghargai kebaikan orang lain, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, untuk menjaga hubungan baik. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat segala tindakan mendorong pemimpin untuk bertindak dengan integritas dan keadilan, mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral yang lebih tinggi⁴⁶.

Dalam kepemimpinan, keseimbangan antara keadilan dan rahmat sangat penting, dan dengan memahami serta menerapkan nilai-nilai ini, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang, yang meningkatkan kinerja dan kesejahteraan seluruh anggota komunitas atau organisasi. Selain itu, Surah Al-Hujurat ayat 10, menegaskan bahwa perdamaian dan rekonsiliasi lebih baik bagi umat Islam, dan ini merupakan jalan yang mendekatkan diri kepada takwa dan rahmat Allah.:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara; karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat⁴⁷."

Ayat ini menekankan bahwa seluruh umat Islam adalah saudara, yang mengharuskan mereka untuk mendamaikan perselisihan dan menjaga harmoni di antara mereka. Selain itu, ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi mediator yang adil dan efektif dalam menyelesaikan konflik, dengan tujuan utama menjaga persaudaraan dan persatuan umat. Pemimpin harus bertindak dengan ketakwaan kepada Allah, yang tidak hanya mendatangkan rahmat, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan dengan cara yang adil dan penuh kasih sayang, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

⁴³Lusi Octaviyanti, Haura Atthahara, and Lina Aryani, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikaobandung Purwakarta', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.9 (2022), h. 3447-3454.

⁴⁴Zulpa Makiah, 'Rekonsiliasi Islam Dan Sains Dalam Perspektif Nidhal Guessoum', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 19.1 (2021), h. 61.

⁴⁵Al-Qur'an Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10', h. 58.

⁴⁶Arsyad Sobby Kesuma, 'Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Dalam Negara Islam', *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 4.1 (2014), h. 120.

⁴⁷Al-Qur'an Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 20-30', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 5 (2019), h. 184.

Dalam konteks kepemimpinan, penerapan konsep pengampunan dan rekonsiliasi sangat krusial. Seorang pemimpin yang bijak harus mampu menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan konflik di komunitasnya⁴⁸. Misalnya, dalam sebuah desa yang mengalami sengketa tanah, pemimpin dapat mengadakan pertemuan untuk mendengarkan keluhan kedua belah pihak dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian yang adil atau kompensasi yang disepakati bersama.

Selain itu, pemimpin harus mendorong dialog terbuka dan transparan antara pihak-pihak yang berseteru. Di lingkungan kerja, jika ada perselisihan antara dua departemen, pemimpin dapat mengadakan sesi mediasi untuk mencari titik temu yang dapat menyelesaikan masalah. Dengan memfasilitasi komunikasi yang baik, pemimpin dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar⁴⁹.

Pemimpin yang baik harus memberikan contoh dengan menunjukkan sikap pemaaf dan menciptakan budaya organisasi yang mengedepankan nilai-nilai pengampunan dan rekonsiliasi. Misalnya, ketika seorang pegawai melakukan kesalahan, pemimpin bisa memilih untuk memaafkan dan memberikan kesempatan kedua. Sikap ini tidak hanya menginspirasi orang lain untuk bersikap pemaaf, tetapi juga membantu membangun lingkungan yang harmonis dan penuh empati. Dengan cara ini, konsep pengampunan dan rekonsiliasi dalam Islam dapat diaplikasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang damai dan penuh dengan rasa saling menghargai.

f. Penegakan Hukum (Qisas dan Ta'zir)

Jika terjadi pelanggaran hukum, pemimpin harus memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hukuman harus dijalankan dengan tujuan menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan lebih lanjut, bukan untuk balas dendam. Penegakan hukum dalam syariah Islam, khususnya melalui konsep Qisas dan Ta'zir, berfokus pada prinsip keadilan dan pencegahan kejahatan. Qisas adalah hukuman yang setimpal dengan kejahatan, seperti dalam kasus pembunuhan atau cedera fisik. Prinsip ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera, sehingga kejahatan serupa dapat dicegah di masa depan⁵⁰.

Dalil dari Surah Al-Baqarah ayat 178 menjelaskan kewajiban Qisas, tetapi juga membuka ruang untuk pemaafan, yang menekankan pentingnya rahmat dan kemudahan dalam hukum Islam.

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Tetapi barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang sangat pedih⁵¹."

Ayat Al-Baqarah 178 menegaskan prinsip Qisas dalam hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam menangani konflik keamanan nasional, pemimpin harus memastikan bahwa hukuman yang diterapkan adalah proporsional dan bertujuan untuk menegakkan keadilan tanpa semata-mata balas dendam. Ayat ini juga memberikan ruang untuk pemaafan, menunjukkan pentingnya pemimpin dalam memediasi dan mempromosikan perdamaian dalam menyelesaikan konflik, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan keamanan nasional, pemimpin dapat memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan, tetapi juga merangkul nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang esensial dalam konteks hukum Islam.

Sementara itu, Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau pemimpin. Hukuman ini diterapkan untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori Hudud atau Qisas dan bisa beragam bentuknya, mulai dari teguran hingga

⁴⁸Akhmad Rifa'i, 'Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam', *Millah*, 1.1 (2010), h. 171-186.

⁴⁹Dede Mustomi, Siswidiyanto Siswidiyanto, and Aprilia Puspasari, 'Pengaruh Komunikasi Dan Kepemimpinan Dalam Penyelesaian Konflik', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 2.3 (2018), h. 28-36.

⁵⁰Ahmad Rajafi, 'Qishash Dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)', *Al-Syir'ah*, 8.2 (2010), h. 459-478.

⁵¹Al-Qur'an Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10', h. 43.

hukuman penjara⁵². Surah An-Nisa ayat 59 menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin dalam menerapkan hukuman Ta'zir, yang menunjukkan bahwa pemimpin memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁵³."

Ayat An-Nisa 59 mengingatkan pemimpin dan masyarakat untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri dalam menyelesaikan konflik keamanan nasional. Pemimpin dituntut untuk menegakkan otoritas dan keadilan, serta memfasilitasi dialog dan mediasi jika terjadi perselisihan. Dengan mengembalikan perbedaan pendapat kepada prinsip-prinsip Islam yang mendasar, pemimpin dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, yang mengarah pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan mendukung stabilitas nasional secara menyeluruh.

Dalam konteks kepemimpinan dan penyelesaian konflik keamanan nasional, pemimpin harus memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penegakan hukum harus bertujuan menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan lebih lanjut. Qisas diterapkan untuk memberikan balasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, sedangkan Ta'zir digunakan untuk pelanggaran yang tidak spesifik dalam syariah, dengan tujuan memperbaiki perilaku pelanggar. Dalam banyak kasus, pemaafan dari korban atau keluarga korban sangat dihargai, yang dapat berkontribusi pada rekonsiliasi dan perdamaian dalam masyarakat.

Penerapan Qisas dan Ta'zir dalam konteks nasional mencakup penanganan kasus-kasus seperti terorisme, pemberontakan, pembunuhan berencana, dan kejahatan ekonomi. Misalnya, dalam kasus terorisme atau pemberontakan, pemimpin dapat menggunakan Ta'zir untuk menetapkan hukuman yang sesuai, seperti penjara atau rehabilitasi, untuk memastikan keamanan nasional dan mencegah ancaman lebih lanjut. Untuk kasus pembunuhan berencana, Qisas dapat diterapkan untuk menegakkan keadilan, tetapi pemimpin juga harus mendorong proses rekonsiliasi jika memungkinkan⁵⁴. Dengan demikian, tujuan utama dari penegakan hukum syariah adalah menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan menjaga keharmonisan serta stabilitas dalam masyarakat.

IV. Penutup

Dalam etika politik Islam, peran pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional sangat ditekankan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap kepentingan umat. Prinsip keadilan (al-adl) menuntut pemimpin untuk bertindak objektif dan tidak memihak, memastikan semua pihak yang terlibat diperlakukan dengan adil. Ini mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan hukum, yang menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Pemimpin juga harus menggunakan kebijaksanaan (hikmah) dalam pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan mengutamakan penyelesaian melalui dialog dan diplomasi sebelum memilih opsi militer. Selain itu, prinsip perlindungan dan keamanan (maslahah) menuntut pemimpin untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif untuk mencegah ketidakadilan dan ancaman terhadap keamanan nasional.

Konsultasi (shura) juga merupakan elemen penting, di mana pemimpin harus melibatkan para ahli dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif dan

⁵²Budi Dermawan and M. Noor Harisudin, 'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud , Qishash Dan Ta ' Zir)', *Rechtenstudent*, 1.3 (2020), h. 251–263.

⁵³Al-Qur'an Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10', h. 125.

⁵⁴Ahmad Syarbaini, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, no. 2 (2018), h. 9–10.

mewakili kepentingan kolektif. Prinsip pengampunan dan rekonsiliasi (afw dan sulh) mendorong pemimpin untuk mengatasi konflik melalui jalan damai, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. Penegakan hukum (qisas dan ta'zir) harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip etika politik Islam oleh pemimpin dalam menangani konflik keamanan nasional sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan harmonis. Dengan mengedepankan keadilan, kebijaksanaan, perlindungan, konsultasi, pengampunan, dan penegakan hukum yang adil, pemimpin dapat mengatasi tantangan keamanan dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memperkuat stabilitas nasional tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemimpin yang mampu menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten akan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat, menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan dan perdamaian jangka panjang.

Daftar Pustaka

- A'raf, Al, 'Dinamika Keamanan Nasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.1 (2015).
- Adnan, Muh., and Muh. Ilham Usman, 'Etika Politik Dalam Al-Qur'an', *Pappasang*, 4.2 (2022).
- Aisyah, Siti, and Ori Fahriansyah Elyta, 'Analisis Kebijakan Presiden Bashar Al-Assad Dalam Menangani Masalah Keamanan Di Suriah Tahun 2019-2020', *Sovereign, Jurnal Hubungan Internasional*, 1 (2021).
- Al-Qur'an Kemenag, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 5.1 (2019).
- , 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 11-20', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (2019).
- , 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 20-30', *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 5 (2019).
- Almubarak, Fauzi, 'Keadilan Dalam Prespektif Islam', *Istighna*, 1.2 (2018).
- Amaritasari, Indah, 'Keamanan Nasional Dalam Konsep Dan Standar Internasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.2 (2015).
- Arifin, Muhamad, 'Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Karakteristik Pemimpin Ideal Menurut Al-Quran', *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3.3 (2023).
- Arqom Kuswanjono, 'Hakikat Ilmu Dalam Pemikiran Islam', *Jurnal Filsafat*, 26.2 (2016).
- Azizah, RR Zahroh Hayati, 'Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan Dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa', *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6.3 (2021).
- Azukma, Najda Arija, and Mardian Idris Harahap, 'Musyawarah Dalam Al-Quran Perspektif Mufassir Nusantara (Quraish Shihab Dan Hasbi Ash-Shiddieqy)', *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, 8.3 (2023).
- Bakry, Umar Suryadi, 'Studi Keamanan Internasional Pasca Perang Dingin', *Science*, 1.1 (2022).
- Brata, TA, 'Peran Kepemimpinan Dalam Mengendalikan Konflik', *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 7.4 (2011).
- Charis, Muhammad, Muhammad Ammar A, Danar Wijongko, and Muhammad Faza Al-Hafizd, 'Kategori Kepemimpinan Dalam Islam', *Edukasi Nonformal*, 1.2 (2010).
- Dahlan, Dewi, 'Etika Politik Dalam Islam (Konstruksi Dan Perspektif)', *Menara Ilmu*, 15.1 (2021).
- Daswati, 'Implementasi Peran Kepemimpinan Dengan Gaya Kepemimpinan Menuju Kesuksesan Organisasi', *Academica Fisip Untad*, 04.01 (2012).
- Dermawan, Budi, and M. Noor Harisudin, 'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum

- Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud , Qishash Dan Ta ' Zir)', *Rechtenstudent*, 1.3 (2020).
- Diana, Rashda, Siswanto Masruri, and Surwandono Surwandono, 'Etika Politik Dalam Perspektif Al-Mawardi', *Tsaqafah*, 14.2 (2018).
- Fazillah, Nur, 'Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *Intelektual Journal Of Education Sciences and Teacher Training*, 12.1 (2023).
- Gusmiarni, Futri Rahayu, 'Peranan Nelson Mandela Dalam Memperjuangkan Demokrasi Di Afrika Selatan Tahun 1990-1994', *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 11.1 (2022).
- Hafniati, 'Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an Dan Sunnah', *Radenintan*, 13.1 (2018).
- Halim, Farhan Rahmawan, 'The Concept of Leadership in Islamic Perspective', *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15.1 (2013).
- Hamid, Abdul, 'Nazhariyyat Al-Fiqih Al-Siyasi Dalam Memilih Pemimpin Pemerintahan Dan Negara Menurut Al-Mawardi', *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Abstrak*, (2015).
- Hamzah, Amir, 'Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)', *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 10.2 (2018).
- Ihsan, Rafiqi, and Iskandar Ritonga, 'The Relevance of Prophet Muhammad's Leadership As a Modern Leadership Role Model', *Jurnal El-Riyasah*, 13.2 (2022).
- Karuru, Perdy, 'Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian', *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2.1 (2013).
- Kesuma, Arsyad Sobby, 'Pandangan Ulama Tentang Kepemimpinan Dalam Negara Islam', *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 4.1 (2014).
- Latif, Muhammad Azhar, 'Pengertian Etika Politik Serta Pendapat Ibnu Taimiyah', *Tashdiq*, 4.2 (2024).
- Lestari, Yayuk, 'Moral Panic And Politics Of Moral- The Role Of Authorities And Middle-Class In The Growth Of Islamic Populism In West Sumatra', *Jurnal Ranah Komunikasi*, 7.2 (2023).
- Maarif, Syamsul Dwi, 'Kriteria Pemimpin Yang Ideal Dalam Islam Beserta Dalil Naqlinya', *Tirto*, (2022).
- Madiha Nawaz , Nimra Irfan , Prof. Dr. Syed Salahuddin Ahmed, 'Syrian Civil War in the Context of Conflict Resolution (Mediation Efforts)', *Pakistan Journal of International Affairs*, 4.1 (2021).
- Makiah, Zulpa, 'Rekonsiliasi Islam Dan Sains Dalam Perspektif Nidhal Guessoum', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 19.1 (2021).
- Marwa, 'Umar Bin Khattab: Potret Keteladanan Sang Pemimpin Umat', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018).
- Maula, Bani Syarif, 'The Concept of *Ṣulḥ* and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law', *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 2.1 (2023).
- Mohd Roslan Mohd, Nor, and Noor Nor Shakila Mohd, 'Perang Salib Dan Kejayaan Salahuddin Al-Ayubi Mengembalikan Islamicjerusalem Kepada Umat Islam (Crusades and Saladin's Achievement in Liberating Islamicjerusalem to Muslims Ummah)', *Jurnal Al-Tamaddun*, 7.1 (2012).
- Mustomi, Dede, Siswidiyanto Siswidiyanto, and Aprilia Puspasari, 'Pengaruh Komunikasi Dan Kepemimpinan Dalam Penyelesaian Konflik', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 2.3 (2018).
- Muttaqin, Ja'far, and Aang Apriadi, 'Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1.2 (2020).
- Muzaqqi, Fahrur, 'Musyawarah Mufakat: Gagasan Dan Tradisi Genial Demokrasi Deliberatif Di Indonesia',

Jurnal Politik Indonesia, 1.2 (2015).

Octaviyanti, Lusi, Haura Atthahara, and Lina Aryani, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikaobandung Purwakarta', *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9.9 (2022).

Olifiansyah Dkk, Muhammad, 'Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam', *At-Tajdid*, 4.4 (2020).